

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Asikin, 2018, Zainal, *Pengaturan Metode Penelitian Hukum* Raja Grafindo Persada.
- Anggia Putri Rambe, *Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis Putusan MK No 79/PUU-IX/2011)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Aulia A. Rachman, 2009, *Sistem Pemerintahan Presidensial Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 Studi Ilmiah Tentang Tipe Rezim, Institusi, dan Konstitusi*, Verbum Publishing, Jakarta.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Unsur-Unsurnya*, UI-Press, Jakarta.
- Bintan R. Saragih, 1993, *Hukum Tata Pemerintahan dan Penerapannya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Diklat Depdagri, Jakarta.
- Buchari Zainun, 1990, *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta, hlm. 75.
- CF Strong, 1975, *Modern Political Constitution An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Sidwick & Jackson Ltd., London.
- H. Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Ismail Suny, 1978, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang

diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Miriam Budiarto, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (edisi revisi), Gramedia, Jakarta.

Mizwar Djamil, 1986, *Mengenal Kabinet RI Selama 40 Tahun Indonesia Merdeka*, Jaya Utama, Jakarta.

Moh. Kusnardi, 1980, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Gramedia, Jakarta.

Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung.

Parbuntian Sinaga, 2022, *Eksistensi Menteri Negara Dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amendemen UUD 1945*, PT Pustaka Mandiri, Tangerang.

Peter Mahmud Marzuki, 2024, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Saldi Isra, 2021, *Lembaga Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satya Arinanto, 2015, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta.

Sri Soemantri, 1993, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

## **C. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.

## **D. Jurnal**

Adelia Rahmawati Putri dan Anajeng Esri Adhi Mahanani, 2022, *Putusan Positive Legislature Pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Wakil Menteri*, Yustisia Tirtayasa, Vol. 2., No. 1.

Geofani Milthree Saragih, 2022, *Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Inggris Dari Berbagai Aspek (Comparison of Indonesian and England Constitutions From Various Aspects)*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol 10, No. 2.

Handika D. A. Pelu, 2022, *Perbandingan Sistem Pemerintahan yang Dianut Oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Negara Lain (Studi Perbandingan Negara Jepang)*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 10, No. 1.

- Ika Fitrianita, Jayanti Puspita Nigrum, dan Suwito, 2022, *Dualisme Rangkap Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU/-XVII/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*, Journal Of Law Review, Vol. 1, No. 1.
- May Lim Charity. 2016. *Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesian State System)*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No.1.
- M. Julyano dan Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivism Hukum*, Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1.
- Moh. Baris Siregar dkk, 2021, *Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Indonesia Law Reform Journal, Vol.1, No.1.
- Moza Dela Fudika, 2016, *Rangkap Jabatan Presiden Sebagai Ketua Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 1.
- Muhammad Anfasha dan Jadmiko Anom, *Mahkamah Konstitusi Dalam Pelarangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019)*, Res Republica Jurnal Hukum Kebijakan Publik, Vol. 7, No. 2.
- Qurrata Ayuni dan Charles Simabura, 2023, *Pembaharuan Kementerian Negara di Indonesia*, Nagari Law Review, Vol. 1., No. 2.
- Solechan, 2019, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Pelayanan Publik*, Administartive Law & Governance Journal, Vol. 2, No. 3.

#### **E. Internet**

- Agatha Vidya Nariswari, Suara.com, *10 Menteri Jokowi yang Rangkap Jabatan, Bukan Cuma Erick Thohir dan Zainudin Amali*, Diakses Dari <https://www.suara.com/news/2023/02/18/132404/10-menteri-jokowi-yang-rangkap-jabatan-bukan-cuma-erick-thohir-dan-zainudin-amali>, pada tanggal 15 Juli 2023, jam 12.40 WIB.

Charles Simabura, Media Indonesia, *ASN dan Rangkap Jabatan*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/opini/575565/asn-dan-rangkap-jabatan>, pada tanggal 21 Juli 2023, pukul 20.00 WIB.

Defara Dhanya Paramitha, Tempo.co, *Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1868919/tiga-materi-yang-direvisi-di-uu->, pada tanggal 2 Juli 2024, pukul 15.30 WIB.

Dwi Putri Cahyawati, Universitas Muhammadiyah Jakarta, *Pakar HTN FH UMJ Tanggapi Polemik RUU Kementerian Negara*, diakses dari <https://umj.ac.id/opini-1/pakar-htn-fh-umj-tanggapi-polemik-ruu-kementerian-negara/>, pada tanggal 2 Juli 2024, pukul 14.23 WIB.

DPR RI, dpr.go.id, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara*, diakses dari [https://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg\\_1-20191206-052843-6611.pdf](https://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191206-052843-6611.pdf), pada tanggal 2 Juli, pukul 16.25 WIB.

Fabian Januarius Kuwado, Kompas.Com, *Jokowi Tegaskan Menterinya Tak Boleh Rangkap Jabatan*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2014/08/26/13123511/Jokowi.Tegaskan.Menterinya.Tak.Boleh.Rangkap.Jabatan>, pada tanggal 3 Mei 2024, pukul 19.00 WIB.

Feri Amsari, Hukum Online, *Arti Presidential Threshold dalam Pemilu*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ipresidential-threshold-i-dalam-pemilu-lt5c2c96b9b0800/>, pada tanggal 15 Mei 2024, pukul 9.30 WIB.

Indonesia Corruption Watch, Antikorupsi.org., *Rangkap Jabatan, Times, Hingga Mantan Terpidana Korupsi: Cacat Integritas dan Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pengangkatan Direksi & Komisaris BUMN*, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/rangkap-jabatan-times-hingga-mantan-terpidana-korupsi-cacat-integritas-dan-potensi-0>, pada tanggal 15 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.

Kemenkeu Republik Indonesia, fiskal.kemenkeu.go.id, *KPK Minta Pejabat Tidak Rangkap Gaji*, diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2008/05/06/112424-kpk-minta->

[pejabat-tidak-rangkap-gaji](#) , pada tanggal 10 Mei 2024, pukul 19.00 WIB.

Rofiq Hidayat, Hukum Online, *Larangan Rangkap Jabatan Aparatur Negara*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/larangan-rangkap-jabatan-aparatur-negara-1t640aacfd26dd/>, pada tanggal 20 April 2024, pukul 16.30 WIB.

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Setkab.go.id, *Menteri Boleh Rangkap Jabatan Parpol, Presiden Jokowi: Pendidikan Tinggi di Bawah Kemendikbud*, diakses dari <https://setkab.go.id/menteri-boleh-rangkap-jabatan-parpol-presiden-jokowi-pendidikan-tinggi-di-bawah-kemendikbud/> , Pada tanggal 3 Mei 2024, Pukul 19.15 WIB.

Ujang Komarudin, Alinea.id, *Yang Salah dari Revisi UU Kementerian Negara*, diakses dari <https://www.alinea.id/politik/yang-salah-dari-revisi-uu-kementerian-negara-b2k6R9PUN>, pada tanggal 2 Juli 2024, pukul 13.40 WIB.

